



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

*HISTORIA VITAE, Vol. 03, No.01, April 2023*

## ANTARA NEGARA PASUNDAN KARTALEGAWA DENGAN NEGARA PASUNDAN WIRANATAKUSUMAH (1947-1950)

**Khopipah Fauziah**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
[khopipahfauziah@students.unnes.ac.id](mailto:khopipahfauziah@students.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Pembentukan negara-negara bagian di Indonesia tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Dr. H.J. van Mook. Perlawanan fisik yang dilakukan mengeluarkan banyak tenaga dan biaya sehingga kurang berguna untuk digunakan. Hal ini membuat Belanda harus memutar otak agar Indonesia dapat kembali ke tangannya dengan cara menyusun strategi serta taktik baru yang bertujuan untuk memecah belah Indonesia. Maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lima masalah pokok, yaitu : (1) Biografi Soeria Kartalegawa dan Wiranatakusumah; (2) Negara Pasundan Kartalegawa; (3) Negara Pasundan Wiranatakusumah; (4) Proses Pemerintahan Negara Pasundan Wiranatakusumah; dan (5) Kembali ke Negara Republik Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan deskriptif analitis sumber, kritik sumber atau Verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi). Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa (1) kedua tokoh utama yang terlibat di dalam Negara Pasundan merupakan sama-sama berasal dari keluarga bangsawan Sunda yang terpelajar dan mempunyai peranan penting dalam pemerintahan pada masa Kolonial Hindia-Belanda. (2) Negara Pasundan yang didirikan oleh Soeria Kartalegawa pada 4 Mei 1947 mengalami banyak tantangan mulai dari penolakan pembentukan sampai kesalahan Belanda dalam memilih tokoh utama. (3) Negara Pasundan Wiranatakusumah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik. (4) Proses Pemerintahan Negara Pasundan Wiranatakusumah mengalami tantangan dari pihak Belanda karena program kabinetnya yang terlihat anti-Belanda. (5) Kembali ke Negara Republik Indonesia melalui pengambilalihan kekuasaan atas permohonan Wali Negara Wiranatakusumah dan juga atas permintaan rakyat yang ingin menyatukan diri dengan Pemerintahan Indonesia.

**Kata Kunci:** *Negara Pasundan, Wiranatakusumah, Kartalegawa, RIS*

### ABSTRACT

*The formation of states in Indonesia cannot be separated from a figure named Dr. H.J. van Mook. Physical resistance that is done spends a lot of energy and costs money, so it is less useful to use. This made the Dutch have to rack their brains so that Indonesia could return to their hands by developing new strategies and tactics aimed at dividing Indonesia. So writing this article aims to describe and analyze five main issues, namely: (1) Biography of Soeria Kartalegawa and Wiranatakusumah; (2) Pasundan Kartalegawa State; (3) Pasundan Wiranatakusumah State; (4) State Government Process of Pasundan Wiranatakusumah; and (5) Return to the Republic of Indonesia. The writing of this article uses descriptive analytic sources,*

source criticism or verification, and the interpretation and writing of history (historiography). The results of the writing show that: (1) the two main figures involved in the Pasundan State were both from Sundanese aristocratic families who were educated and had important roles in the government during the Dutch East Indies Colonial period. (2) The Pasundan State, which was founded by Soeria Kartalegawa on May 4, 1947, experienced many challenges, ranging from the refusal of its formation to the Dutch's mistakes in choosing the main character. (3) The State of Pasundan Wiranatakusumah obtains approval from the Government of the Republic. (4) The government of the Pasundan Wiranatakusumah State experienced challenges from the Dutch because the cabinet program seemed to be anti-Dutch. (5) Return to the Republic of Indonesia through the takeover of power at the request of the Wali Negara Wiranatakusumah and also at the request of the people who wish to unite themselves with the Government of Indonesia.

**Keywords:** Pasundan State, Wiranatakusumah, Kartalegawa, RIS

## PENDAHULUAN

Diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI telah disepakati bahwasanya wilayah Indonesia dibagi atas delapan provinsi meliputi provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil dengan gubernur di tiap masing-masing wilayah tersebut. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak direstui oleh pemerintah Kolonial Belanda sehingga mereka mencoba kembali ke Indonesia pada bulan selanjutnya dengan memboncengi NICA. Perlawanan fisik dari kedua belah pihak tidak dapat dihindari, dimana pihak Belanda ingin menguasai kembali bekas koloninya ini dan pihak Indonesia yang tetap ingin mempertahankan kemerdekaannya.

Perlawanan fisik yang dilakukan mengeluarkan banyak tenaga dan biaya sehingga kurang berguna untuk digunakan. Hal ini membuat Belanda harus memutar otak agar Indonesia dapat kembali ke tangannya dengan cara menyusun strategi serta taktik baru. Cara baru ini bertujuan untuk memecah belah Indonesia dengan memerintah secara tidak langsung melalui pembentukan negara-negara federal dengan mengikatnya dalam sebuah federasi atau serikat. Wilayah-wilayah yang akan dijadikan negara bentukan Belanda diambil melalui jalur kekerasan dan paksaan. Dengan karakteristik tertentu yaitu *indirect rule* (pemerintahan tidak langsung), pejabat-pejabat orang Indonesia sering berkonsultasi dengan pemerintah Belanda, adanya dukungan militer yang besar, serta terdapat banyak kaum nasionalis yang dimasukkan ke dalam penjara.

Pembentukan negara-negara bagian di Indonesia tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Dr. H.J. van Mook. Van Mook adalah seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda sekaligus kepala NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) sehingga peranannya dalam gerakan federal cukup besar. Antara tahun 1946-1949, Belanda telah berhasil membentuk 15 negara federal yang kemudian dibagi ke dalam dua kelompok yaitu enam negara dan sembilan daerah istimewa. Adapun orang-orang Indonesia yang mendukung pembentukan negara federal ini merupakan mereka yang bisa dibilang pengecut dan takut akan kehilangan jabatan maupun posisinya sehingga secara sukarela mereka lebih mendukung bangsa lain dibanding bangsanya sendiri.

Salah seorang bangsawan Sunda, Soeria Kartalegawa, menolak pengangkatan Soetardjo Kartohadikoesomo sebagai Gubernur Jawa Barat hanya karena berasal dari

Jawa. Hal tersebut kemudian menjadi alasan Soeria Kartalegawa untuk mendirikan Negara Pasundan melalui PRP. Dengan dukungan Belanda baik dari segi material dan lainnya Negara Pasundan berhasil dibentuk. Namun, menimbulkan reaksi pertentangan dalam pembentukannya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama yaitu heuristik, dimana dalam tahapan ini berupa kegiatan pengumpulan sumber yang relevan dengan pembahasan yang sedang dikaji. Adapun sumber-sumber yang digunakan berupa sumber sekunder baik berupa buku, artikel maupun bahan referensi terkait. Tahap kedua yaitu kritik sumber yang terdiri dari kritik sumber ekstern dan intern. Tahap ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran untuk mendapatkan fakta dan data yang selanjutnya akan digunakan untuk tahapan terakhir yaitu historiografi (penulisan sejarah).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wilayah Jawa Barat pada masa pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda telah menjadi sebuah provinsi dengan sebutan *West Java*. Begitu juga setelah kemerdekaan Indonesia, Jawa Barat masih menjadi sebuah provinsi dengan gubernurnya yang bernama Sutarjo Kartohadikusumo dan pada tahun 1947 diganti oleh Mr. Datuk Jamin. Anjuran pemerintah dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) daerah Priangan. Selain itu, dibentuk juga laskar-laskar perjuangan seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), AMPTT (Angkatan Muda Pos Telegram Telepon), Persatuan Pemuda Pelajar dan lainnya. Pembentukan badan-badan tersebut tidak lain untuk mempertahankan Indonesia. Dari pelucutan senjata tentara-tentara Jepang hingga kedatangan Inggris ke Kota Bandung dilakukan melalui perlawanan baik oleh penduduk maupun tentara. Setelah terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, Bandung kemudian dikuasai oleh sekutu hingga 27 Mei 1946 dengan menyerahkan kekuasaan ke Belanda sehingga perlawanan beralih ke pihak Belanda.

Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 menimbulkan pembicaran antara Belanda dan Indonesia mengenai pengembalian Bandung. Pembicaran-pembicaran yang dilakukan tidak menimbulkan hasil terutama dengan adanya gerakan dari Partai Rakyat Pasundan (PRP) untuk membentuk Negara Pasundan.

Pada 21 Juli 1947, dengan adanya Agresi Militer I dari Belanda membuat Jawa Barat menjadi sasaran penyerbuan dan berhasil menguasai sebagian dari wilayah Jawa Barat. Ditambah, Divisi Siliwangi yang harus pindah ke Jawa Tengah akibat dari Perjanjian Renville membuat rencana pembentukan Negara Pasundan semakin dikencangkan dan mulai dilaksanakan.

### **Biografi Soeria Kartalegawa**

Bernama lengkap Raden Adipati Aria Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa merupakan seorang golongan bangsawan Sunda. Ia lahir pada 26 Oktober 1987 di Garut. Bapaknya, Musa Kartalegawa adalah seorang penghulu agama di Garut yang

semasa hidupnya aktif di *Politeik Economie Bond* (organisasi anti terhadap gerakan kebangsaan Indonesia)<sup>1</sup>.

Soeria Kartalegawa yang pernah menjadi bupati Garut periode 1929-1944. Dikarenakan kesetiaannya kepada pemerintah Kolonial Hindia-Belanda sehingga dijanjikan akan menjadi bupati selama tujuh turunan. Hal ini membuat Soeria Kartalegawa tinggi hati dan merasa yang paling berkedudukan tinggi. Namun, sebenarnya ia tidak terlalu terkenal di kalangan Belanda. Dalam pimpinannya di Garut pun ia sering kali terlibat dalam praktik korupsi yang kemudian membuatnya mendapatkan julukan *frauder* atau penipu oleh Charles van der Plas.

Setelah proklamasi kemerdekaan diikrakan, Soetardjo Kartohadikoesomo diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Soeria Kartalegawa tidak terima dengan pengangkatan tersebut karena Soetardjo merupakan orang Jawa yang seharusnya tidak memimpin di Tanah Sunda. Selain itu, ambisinya yang ingin menempati posisi tinggi di wilayahnya menjadi salah satu alasan Soeria Kartalegawa akhirnya mendirikan Negara Pasundan.

### **Negara Pasundan Kartalegawa**

Pada 18 November 1946, Soeria Kartalegawa mendirikan sebuah partai bernama Partai Rakyat Pasundan (PRP)<sup>2</sup>. Menurutny, pada April 1947 atau kurang lebih lima bulan setelah partainya didirikan, PRP telah menggaet 250.000 anggota. Tujuan pembentukan PRP sendiri ialah untuk membentuk negara yang terpisah dari Republik Indonesia.

Soeria Kartalegawa dengan sengaja tidak mengikuti alur atau kesepakatan yang telah dibuat baik dengan Republik Indonesia maupun dengan van Mook yang notabenehnya merupakan atasannya. Perundingan-perundingan yang telah dilakukan dengan PM Syahrir telah diputuskan bahwa kedua belah pihak setuju untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Kesepakatan ini disetujui di Perundingan Linggarjati hanya saja belum disahkan. Namun, lima hari kemudian Soeria Kartalegawa membentuk PRP dengan tujuan mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka berdaulat atas dasar demokrasi dan bukan merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Soeria Kartalegawa mengadakan kampanye untuk melaksanakan tujuan PRP yaitu pembentukan Negara Pasundan lengkap dengan bendera dengan warna hijau-putih yang melambangkan harapan dan kesucian. Kampanye ini mendapat banyak dukungan dari pejabat Belanda baik militer maupun sipil. Van Mook pada tanggal 3 Mei 1947, mengirim surat kepada komandan divisi B de Waal untuk membantu rapat umum di Bandung. Agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, van Mook memberikan bantuan berupa transportasi, uang bahkan senjata.

Pada 4 Mei 1947, Soeria Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan di depan ribuan rakyat dalam sebuah pertemuan di alun-alun Bandung. Rakyat yang datang ke pertemuan tersebut dikerahkan dari Ujungberung dan Kiaracondong, diangkut dengan truk-truk milik Belanda. Dalam pidatonya, Soeria Kartalegawa mengangkat

---

<sup>1</sup>Darmansyah, Maman. 2018. "Garut Era Kepemimpinan Bupati Soeria Kertalegawa (1915-1929)." *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, No. 02, hlm. 374-382.

<sup>2</sup>Pangersa, Sugih Rachmat. 2021. "Kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan (1947-1950)." *FACTUM*, Vol. 10, No. 01.

dirinya menjadi presiden dengan Perdana Menteri Mr. R. Kustomo. Selain itu, dibentuk pula kabinet dan badan pekerja.

Tujuan PRP dalam membentuk Negara Pasundan ialah sebagai berikut:

1. Proklamasi kemerdekaan yang digaungkan itu atas kemauan rakyat Sunda sendiri sebagai satu-satunya jalan politik negara nanti.
2. PRP akan menentang usaha memasuki daerah yang telah merdeka ke dalam republik.
3. PRP mendorong upaya pemungutan suara di daerah-daerah yang telah merdeka.
4. Bandung dijadikan sebagai ibukotanya.
5. Pengembalian pabrik dan *onderneming-onderneming* akan diurus oleh PRP.
6. Meminta pengakuan pemerintahan sementara jika pemungutan suara telah diadakan.
7. Pemerintahan sementara statusnya sama dengan pemerintah Indonesia Timur.
8. Presiden terpilihnya yaitu Soeria Kartalegawa dengan Dr. Kustomo sebagai Kabinet Formatur.

Proklamasi kemerdekaan disebarluaskan dengan pembentukan cabang-cabang PRP. Di Jakarta dan di Karawang dibentuk sebanyak 20 cabang PRP. PRP juga menyita dan menduduki sisa administrasi pemerintahan Republik di Bogor dengan bantuan Kolonel Thomson.

Reaksi penolakan terhadap pembentukan Negara Pasundan berasal dari pemerintahan Republik dan tokoh-tokoh Jawa Barat. Salah satu organisasi Sunda yaitu Paguyuban Pasundan juga menolak karena mereka menginginkan Jawa Barat masuk ke dalam pemerintahan Republik. Diadakan lah rapat-rapat untuk menentang Negara Pasundan, di Garut tentara Republik mengadakan sayembara bagi siapa saja yang dapat menangkap Soeria Kartalegawa baik hidup atau mati. Wiranatakusumah, salah seorang tokoh Sunda mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno yang berisikan penolakan terhadap pendirian Negara Pasundan dan mendukung penuh terhadap pemerintahan Republik. Bahkan orang tua dari Soeria Kartalegawa sendiri menolak dengan keras pembentukan ini. Sang ibu berbicara di Radio Republik Indonesia di Garut yang intinya tidak menyetujui pembentukan Negara Pasundan.

Reaksi-reaksi yang ditimbulkan membuat Belanda sadar bahwa Soeria Kartalegawa tidaklah sepopuler itu sehingga lebih banyak ditentang dibandingkan dengan yang setuju. Hal ini membuat Belanda harus berpikir ulang untuk dapat membentuk Negara Pasundan yang lain. PRP tidak bubar namun Negara Pasundan buatan Soeria Kartalegawa hilang dengan sendirinya. Dengan pembentukan Negara Pasundan yang baru, posisi Soeria Kartalegawa menjadi salah satu anggota Parlemen Pasundan PRP. Ia tetap mendukung pembentukan baru ini.

### **Biografi Wiranatakusumah**

Raden Aria Adipati Wiranatakusumah V lahir di tahun 1888 di Bandung dengan nama kecil Raden Muharam. Wiranatakusumah sempat diurus oleh Penasehat Urusan Pribumi yaitu Snouck Hurgronje. Ia memulai pendidikannya di *Europeesch Lagere*

*School* (ELS) dan selalu mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti orang Eropa. Ia juga dikenal sebagai orang yang berkepribadian baik dan pandai dalam bergaul.

Selanjutnya, Wiranatakusumah masuk ke OSVIA yang nantinya akan menjadi pegawai pemerintah atau mantri polisi. Setelah lulus, Wiranatakusumah melanjutkan ke *Hogereburgerschool* (HBS) di Batavia. Menurut teori kaum elit di Indonesia, warga pribumi yang masuk ke dalam sekolah elit terbagi menjadi dua golongan yaitu priyayi nasionalis dan priyayi birokratis. Priyayi nasionalis setelah lulus tidak berminat untuk menjadi pegawai pemerintah. Sementara itu, priyayi birokratis biasanya menjadi pegawai pemerintah, misalnya bupati. Namun, priyayi birokratis juga memiliki sikap nasionalis dalam dirinya. Begitu pula dengan Wiranatakusumah, ia menjadi pegawai pemerintah Hindia-Belanda namun hal tersebut dimanfaatkan untuk jalan menuju kemerdekaan Indonesia.

Karirnya selama menjadi pegawai pemerintah yaitu menjadi juru tulis Wedana Tanjungsari, Sumedang pada tahun 1910. Dilanjutkan dengan menjadi Mantri Polisi di Cibadak, Sukabumi, Sukapura, dan Tasikmalaya. Wiranatakusumah juga pernah menjadi Asisten Wedana Obeureum di Tasikmalaya. Pada tahun 1912-1920, ia menjadi Bupati Cianjur. Selain sebagai pegawai pemerintahan, Wiranatakusumah bekerja sebagai jurnalis di Majalah *Tjahaja Pasoendan* tahun 1914-1917, Majalah *Obor* tahun 1921-1924, dan Majalah *Pemimpin* tahun 1929-1935.

### **Negara Pasundan Wiranatakusumah**

Kegagalan Negara Pasundan bentukan Soeria Kartalegawa membuat Belanda kembali membentuk Negara Pasundan baru. Pembentukan kali ini melibatkan berbagai tokoh-tokoh di Jawa Barat. Dimulai dengan mengadakan konferensi sebanyak tiga kali, yaitu Konferensi Jawa Barat I pada 13 – 18 Oktober 1947. Konferensi Jawa Barat II dilaksanakan pada tanggal 16 – 20 Desember 1947 dan Konferensi Jawa Barat III pada 23 Februari hingga 5 Maret 1948.

Dasar pembentukan Negara Pasundan terletak di Konferensi Jawa Barat I. konferensi ini dihadiri 50 orang anggota pemuka rakyat dari berbagai golongan dari seluruh Jawa Barat kecuali Banten dan konferensi ini dianggap sebagai pertemuan atau rapat keluarga semata. Pembicaraannya mengenai keinginan rakyat Jawa Barat memiliki pemerintahan sendiri dalam jangka waktu secepatnya, keinginan untuk menghilangkan perbedaan di antara pamongpraja Belanda dan Indonesia, serta Jawa Barat bagaimana mengambil bagian dalam Negara Indonesia Serikat, diakhiri dengan tujuan untuk memulihkan keamanan. Hasil dari konferensi pertama ini yaitu dengan pembentukan panitia penghubung antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan rakyat, yang bertugas untuk mengadakan konferensi bagi semua wakil rakyat di Jawa Barat untuk membentuk pemerintahan sendiri yang berdasarkan asas demokrasi. Panitia ini diketuai oleh R. Hilman Jayadiningrat dan dibantu oleh R. Juwarsa, R. Tirtasuyatna, R. Sunariakusumah, dan R. Musa Sastranegara.

Mengenai susunan ketatanegaraan yang akan dilaksanakan dibicarakan dalam konferensi ini dengan berbagai pandangan yang berbeda dari setiap anggotanya. Ranuwijaya berpendapat bahwa untuk menentukan corak negara menunggu keputusan dari Komisi Tiga Negara (KTN). Akhmad Atmaja membuat usulan mengubah nama Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat dengan lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih tetap ada. Akhmad Sanusi memberi usul agar segala

keputusan diambil secara demokratis. Sementara itu, Martadisastra mengusulkan agar bentuk pemerintahan didasarkan pada Islam. Dengan pendapat yang berbeda-beda tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu orang Sunda setuju dengan pembentukan Negara Pasundan, orang Sunda yang menolak pembentukan Negara Pasundan dan orang-orang yang setuju dengan pembentukan negara baru atau pemerintahan bercorak Islam atau tuntutan daerah istimewa.

Konferensi Jawa Barat II dihadiri 170 anggota yang mewakili golongan di Jawa Barat terdiri dari orang Indonesia, Cina, Arab, dan Belanda. Panitia Penghubung yang sebelumnya dibentuk dalam Konferensi Jawa Barat I berubah menjadi Panitia Persiapan dengan tambahan anggota sehingga jumlahnya menjadi 11 orang. Perwakilan Indonesia yaitu Wisaksono, Oto Subrata dan Male Wiranatakusumah. Perwakilan Cina, Ir. Tan Hwat Tiang dan perwakilan Belanda yaitu Ir. Wermuth. Dari golongan Arab diwakili oleh Usman Aljufri. Untuk ketuanya diganti menjadi R. Tg. Juwarsa dengan tambahan anggota yaitu R.H. Ranuwijaya. Panitia ini lah yang nantinya akan mempersiapkan konferensi selanjutnya, Konferensi Jawa Barat III.

Kembali ke Konferensi Jawa Barat II mengambil keputusan supaya dibentuk Pemerintahan Sementara untuk Jawa Barat dimana negara ini akan masuk ke dalam Indonesia Serikat. Setelah pelaksanaan konferensi kedua ini, dikeluarkan lah manifest yang disebut dengan Manifest 20. Manifest ini dikirim ke Komite Jasa Baik dari Dewan Keamanan PBB, Pemerintah Republik dan pers, isinya yaitu Konferensi Jawa Barat (II) tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan mengenai status Jawa Barat. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Jawa Barat harus mendapatkan kesempatan otonomi dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia tentunya.

Jenderal Spoor membentuk Pasukan Pegawai dengan tujuan menjaga keamanan dan ketentraman Negara Jawa Barat dengan membuka pendaftaran bagi para pemuda yang berminat. Pasukan Pegawai akan dibentuk pada 1 Februari 1948 di Cimahi namun Negara Jawa Barat-nya belum terbentuk. Selanjutnya diadakan pelatihan Batalyon Pasundan dan anggotanya digaji setara gaji KNIL. Setelah melakukan pelatihan, batalyon-batalyon itu akan menjadi Batalyon Keamanan (*Veiligheids Batallion*) dengan tugas menjaga keamanan pemerintahan negara bentukan Belanda.

Penolakan terhadap pembentukan Negara Pasundan baru ini muncul dari dua pihak yaitu PRP Soeria Kartalegawa. Alasannya karena Negara Pasundan sudah terbentuk ketika Soeria Kartalegawa memproklamasikannya pada 4 Mei 1947 di alun-alun Bandung. Dengan menyuarakan pendapatnya yaitu agar bahasa Sunda menjadi bahasa kebangsaan dan pakaian dengan ikat kepala bendo menjadi pakaian kebangsaan. Namun, kritikan dari Soeria Kartalegawa menghilang ketika Belanda menunjuk dirinya untuk terjun ke dalam Parlemen Pasundan. Sementara itu, penolakan lainnya yaitu berasal dari tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan yang pro Republik. Para tokoh tersebut mengadakan rapat dengan hasil tetap mempertahankan Jawa Barat sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia turut menentang pembentukan Negara Jawa Barat dengan mengeluarkan maklumat pada 15 Februari 1948 yang berisi bahwa jika konferensi Jawa Barat dilakukan sebelum persetujuan dengan pihak Indonesia maka akan diadakan kembali setelah Renville dan tidak menerima hasil yang telah didapat

sebelumnya. Pemungutan suara dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tinjauan dari KTN merupakan salah satu jalan penyelesaian yang tepat.

Setelah aksi penolakan itu, Konferensi Jawa Barat III diselenggarakan setelah penandatanganan persetujuan Renville. Dengan dihadiri 100 orang wakil dari beberapa bangsa, konferensi berlangsung selama sepuluh hari. Di dalamnya terdapat dua golongan, yaitu golongan Republik dan golongan federal. Hasil konferensi tersebut menghasilkan pembentukan Negara Pasundan, Parlemen Pasundan, pemilihan Wiranatakusumah sebagai wali negara, dan pengangkatan Perdana Menteri Adil Puradireja.

### **Proses Pemerintahan Negara Pasundan Wiranatakusumah**

Wiranatakusumah menyetujui penunjukan dirinya sebagai wali negara setelah pemerintah Republik Indonesia merestunya. Adapun sikap-sikap Wiranatakusumah terhadap pembentukan Negara Jawa Barat termaktub dalam pernyataannya. Dalam salah satu wawancaranya Wiranatakusumah dengan Antara pada 30 Desember 1947, ia menyatakan bahwa *dalam prinsip saya tidak setuju dengan gerakan separatisme yang dilakukan Belanda sekarang ini, apalagi kalau saya memang dicalonkan untuk menjadi kepala negara Jawa Barat ciptaan KIS (Komite Indonesia Serikat)*.

Salah satu alasan Wiranatakusumah menyetujui pengangkatan dirinya sebagai kepala negara ialah ia tidak mau jabatan tinggi tersebut jatuh ke tangan orang yang pro-Belanda dan lebih baik ia yang seorang Republikan menerimanya. Sehingga nantinya Wiranatakusumah dapat berbuat banyak dalam kaitannya dengan Republik Indonesia. Bahkan, Menteri Agama, Kiai H. Maskyur mengatakan bahwa dengan terpilihnya Wiranatakusumah sebagai kepala negara merupakan suatu kemenangan bagi Republik.

Pada 24 April 1948, Wiranatakusumah dilantik sebagai wali negara oleh Dr. H.J. van Mook. Pelantikan ini dihadiri oleh Sekretaris Umum (Negara) Pemerintah Federal Sementara, Abdul Kadir Wijoyoatmojo dan *Recomba* Jawa Barat, Hilman Jayadiningrat. Abdul Kadir kemudian membacakan Surat Keputusan Nomor 1 tentang pengakuan terhadap Negara Pasundan mulai dari 23 April 1948. Setelahnya, Wiranatakusumah berpidato dalam bahasa Sunda yang isinya menyuruh rakyat Pasundan supaya bersungguh-sungguh dan bekerja sama demi kemakmuran bangsa dan negara<sup>3</sup>.

Meskipun susunan kenegaraan telah dibuat oleh Panitia Persiapan dan ahli dari Pemerintah Federal Sementara sebelum negara terbentuk. Sidang Parlemen pada 2 Maret 1948 menolak corak serikat yang sebelumnya telah disusun. Parlemen Pasundan memilih pemerintahan dengan model continental Eropa Barat yaitu parlementer dimana Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Selanjutnya, setiap fraksi, yaitu Fraksi Nasional dengan Suradireja, Fraksi Indonesia dengan R. Adil Puradireja, dan Fraksi Kesatuan Male Wiranatakusumah memilih Mr. Dr. Kusumaatmaja untuk menyusun sebuah kabinet dan berakhir dengan penolakan. Akhirnya, R. Adil Puradireja menjadi formatur kabinet dengan membentuk Kabinet Pasundan.

Pada 13 Mei 1948, R. Adil Puradireja berpidato dalam sidang Parlemen Pasundan untuk menyampaikan dasar-dasar politik program kabinetnya, yaitu untuk

---

<sup>3</sup>Sjamsuddin, Helius dkk. 1992. *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

memajukan perjuangan ke arah Indonesia Serikat yang merdeka sebagai negara bagian, pemberian hak yang sama kepada seluruh warga, serta melindungi hak-hak minoritas. Adapun untuk tugasnya sendiri ialah mengembalikan keamanan dan ketertiban umum dengan menyelenggarakan hak-hak negara seperti kemerdekaan berpikir, melindungi hak-hak manusia, dan memberi kesempatan yang sama untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kabinet ini juga menyelenggarakan Konferensi Federal pertama pada 29 Mei 1948. Konferensi ini dihadiri utusan dari negara-negara lain bentukan Belanda dimana menghasilkan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) atau badan kerja sama dari negara-negara bagian sebagai persiapan bentuk federasi. Konferensi Federal kedua pada 12 Juli 1948 menghasilkan “Resolusi Bandung” yang berisi NIS (Negara Indonesia Serikat) harus sudah berdiri pada 1 Januari 1949 dan pemerintahan *ad interim* federal.

Kabinet Pasundan Puradireja hanya bertahan selama enam bulan saja. Ia meletakkan jabatannya sebagai wujud dari protes terhadap Agresi Militer Belanda II. Ketiadaan R. Adil Puradireja membuat Negara Pasundan mengalami kemandegan dalam pemerintahannya sehingga menyulitkan pihak Belanda. Sehingga Letnan Jenderal Simon Sporr dan Dr. R.W. van Diffelen mendatangi Wiranatakusumah. Dengan berbagai tekanan yang diterima, akhirnya Wiranatakusumah menunjuk Mr. R.T. Jumhana Wiriaatmaja sebagai pembentuk kabinet. Kelemahan Wali Negara Wiranatakusumah selain datang dari tekanan Belanda juga dari kesehatannya dimana ia tidak mampu melaksanakan tugasnya secara penuh.

Kabinet Pasundan kedua akhirnya terbentuk dengan Mr. R.T. Jumhana Wiriaatmaja selaku Perdana Menteri. Setelah pembentukan kabinet, Jumhana mengikuti Konferensi Federal di Jakarta. Program kabinet yang telah dibuatnya ditolak karena anti-Belanda. Adapun program kerja kabinet kedua ini adalah rehabilitasi Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta; Pembentukan pemerintahan interim; Perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda dilanjutkan dengan pengawasan PBB; dan perwakilan dari setiap negara bagian.

Komisaris tinggi mahkota Belanda untuk Indonesia, L.J.M. Beel mengingatkan kepada Wiranatakusumah jika Kabinet Jumhana tidak segera diganti, maka Negara Pasundan terancam dibubarkan. Ancaman lainnya berupa penangkapan anggota-anggota pemerintahan Negara Pasundan yang di antaranya ialah Male Wiranatakusumah, Adil Puradireja, Mr. Hasan, dan tokoh pro-Republik lainnya. Jawaban Wiranatakusumah yaitu akan meletakkan jabatannya sebagai wali negara jika orang-orang tersebut ditangkap. Belanda tetap melakukan penangkapan namun bukan kepada nama-nama yang telah disebutkan. Peristiwa penangkapan itu membuat para anggota kabinet dan parlemen serasa terintimidasi. Sehingga ketakutan mereka ialah adanya penangkapan-penangkapan jika terus membangkang kepada Belanda. Kekisruhan dalam internal pemerintahan ini membuat Perdana Menteri Jumhana mengundurkan diri dari jabatannya.

### **Kembali ke Negara Republik Indonesia**

Sebagai bentuk dari kesepakatan di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda terbentuklah Republik Indonesia Serikat

(RIS) pada 27 Desember 1949<sup>4</sup>. Tujuan pembentukan RIS beserta negara-negara bagian lainnya untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sebuah negara federal. Begitu pula dengan salah satu negara bagian yaitu Negara Pasundan yang nantinya akan melebur menjadi bagian dari RIS.

Keinginan untuk membubarkan Negara Pasundan datang dari berbagai kalangan, baik itu dari rakyat, pejabat-pejabat pemerintahan serta anggota-anggota Parlemen Pasundan. Kritikan terhadap Pemerintah Pasundan datang dari Fraksi Nasional yang mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam memerintah dan tidak mengindahkan keinginan rakyat. Pada sidang Parlemen 17 Desember 1949, Pemerintah Pasundan mengeluarkan pernyataannya yaitu kesediaan meletakkan jabatan apabila keamanan tidak terjamin. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Dasar RIS 1949, pemerintah memberi kesempatan untuk menampung suara rakyat guna menentukan kedudukan dan nasib masing-masing.

Negara Pasundan mengajukan permohonan kepada Pemerintah RIS agar memberikan bantuan sepenuhnya. Sebagai respon dari permohonan tersebut, Pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan penyelenggaraan tugas pemerintah Negara Pasundan oleh Komisaris Pemerintah RIS dengan mengangkat Mr. Sewaka sebagai komisaris pemerintah. Tugasnya sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan dari Negara Pasundan dan bertanggung jawab ke Pemerintah RIS. Setelah Undang-Undang Darurat dan Surat Keputusan Presiden RIS No. 58 Tahun 1950 dikeluarkan, maka pada 10 Februari 1950 diadakan upacara penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pasundan kepada Komisaris RIS. Dengan penyerahan kekuasaan kepada Komisaris RIS maka berakhirilah pemerintahan Negara Pasundan.

Setelah penyerahan pemerintahan dari Negara Pasundan ke Komisaris RIS, dukungan dari berbagai kalangan terus berdatangan. Hal ini terjadi karena masyarakat mempunyai keinginan untuk menyatukan diri dengan Republik Indonesia. Dipegangnya kekuasaan pemerintahan oleh Komisaris RIS membuat pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan pemerintah RIS. Hal ini membuat proses kembalinya wilayah Pasundan ke Republik Indonesia dapat berjalan dengan cepat.

## **SIMPULAN**

Agresi Militer Belanda I membuat Jawa Barat sebagai sasaran penyerbuan. Ditambah dengan adanya Perjanjian Renville membuat rencana pembentukan Negara Pasundan semakin mendekati tahapan yang pasti. Diawali dari seorang bangsawan Sunda yang haus akan kekuasaan, yaitu Soeria Kartalegawa, mantan Bupati Garut. Dari rasa iri hati, Soeria Kartalegawa menentang dan tidak terima mengenai pengangkatan Soetardo Kartohadikusumo menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Soekarno. Alasannya ialah kenapa harus orang Jawa yang memimpin di tanah Sunda, sementara masih banyak tokoh-tokoh Sunda lainnya yang dapat dijadikan gubernur. Soeria Kartalegawa kemudian mendirikan PRP dan mengikrarkan pendirian Negara Pasundan pada 4 Mei 1947 di Bandung. Namun, pembentukan Negara Pasundan malah menimbulkan

---

<sup>4</sup>Tasnur, Irvan dan Muhammad Rijal Fadli. 2019. "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 5, No. 2.

pertentangan dari berbagai golongan sehingga Belanda sadar bahwa merupakan sebuah kesalahan memilih Soeria Kartalegawa. Belanda kemudian membuat rencana untuk membentuk Negara Pasundan yang baru. Kali ini, Belanda memilih Wiranatakusumah sebagai wali negara. Pembentukan Negara Pasundan yang baru ini melalui tiga konferensi yaitu Konferensi Jawa Barat I pada 13 – 18 Oktober 1947. Konferensi Jawa Barat II tanggal 16 – 20 Desember 1947 dan Konferensi Jawa Barat III pada 23 Februari hingga 5 Maret 1948. Setelah itu, pada 24 April 1948, Wiranatakusumah dilantik menjadi Wali Negara Pasundan. Kabinet pertamanya yaitu Kabinet Pasundan R. Adil Puradireja dan Kabinet Pasundan Mr. R.T. Jumahan Wiriatmaja. Kabinet-kabinet ini memiliki masalah dan pertentangan dengan Belanda sehingga menimbulkan sedikit kekisruhan di dalam pemerintahan Negara Pasundan. Lalu, setelah penandatanganan KMB, Negara Pasundan menyerahkan kekuasaannya ke tangan Komisaris RIS sehingga berakhirlah kekuasaan Negara Pasundan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darmansyah, Maman. 2018. “Garut Era Kepemimpinan Bupati Soeria Kertalegawa (1915-1929).” *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, No. 02, hlm. 374-382.
- Frakking, Roel. 2016. “Gathered on the Point of a Bayonet: The Negara Pasundan and the Colonial Defence of Indonesia, 1946-50.” *The International History Review*, Vol. 39, No. 1, hlm. 30-47.
- Irshanto, Bagus Andre. 2017. “Kiprah Politik Paguyuban Periode 1927-1959.” *DIAKRONIKA*, Vol.17, No. 1, hlm. 76-89.
- Mulyana, Agus. 1996. “Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda menuju Integrasi Nasional.” *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*.
- Prabowo, Mohammad Rikaz dan Aman. 2022. “Kedaulatan Semu: Praktik Pemerintahan Negara dan Daerah Bentukan Belanda 1947-1948.” *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 1, hlm. 18-32.
- Pangersa, Sugih Rachmat. 2021. “Kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan (1947-1950).” *FACTUM*, Vol. 10, No. 01.
- Rinardi, Haryono. “Dari Negara Federasi menjadi Negara Kesatuan: Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- Sjamsuddin, Helius dkk. 1992. *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sasi, Galuh Ambar. 2020. “Membentang Republik, Meregang Konsensus: Etnitas Indonesia dalam Spanduk Protes Perempuan Masa Revolusi.” *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, hlm. 267-384.
- Tasnur, Irvan dan Muhammad Rijal Fadli. 2019. “Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949).” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 5, No. 2.

Zuhdi, Susanto. 2003. "Antara Sewaka dan Soeria Kartalegawa: Dinamika Politik Pemerintahan di Jawa Barat pada Masa Revolusi Indonesia." *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 7.